

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Skripsi

Dibuat oleh:

Ayu Lestari 022115231

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR 2021

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gerlar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

kan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada Hari: Rabu Tanggal: 02 / Juni / 2021

> Ayu Lestari 022115231

Menyetujui, Ketua Sidang Penguji

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak. MM, CA)

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

(Enok Rusmanah, S.E., M.Acc.)

Anggota Komisi Pembimbing

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : /KEP/REK/II/2020

Tentang : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN

INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari NPM : 022115231

Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak

Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis Desertasi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, April 2021

Ayu Lestari 022115231

©Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Ayu Lestari. 022115231. Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Dibawah bimbingan Arief Tri Hardiyanto dan Enok Rusmanah. 2021.

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat terhindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Salah satu manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan utang adalah adanya beban bunga atas utang yang termasuk biaya usaha yang dapat menjadi pengurang penghasilan (pasal 6 (1) UU No. 36 tahun 2008), sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar peruahaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis perkembangan Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Stuktur modal (DER) perusahaan perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018 setiap tahunnya mengalami fluktuasi jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal berfluktuasi naik turun.

Tujuan penelitian ini yaitu : menguji pengaruh struktur modal (DER) dan manajemen laba baik secara parsial maupun simultan terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 23 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey yang bermaksud untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Data diuji dengan menggunakan SPPS dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian: Secara simultan (Uji F) semua variabel independen yaitu struktur modal (DER) dan manajemen laba secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Struktur modal (DER) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,954 > 1,6563). Manajemen laba secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,400 > 1,6563).

Kata Kunci: Struktur Modal, Manajemen Laba dan Pajak Penghasilan Badan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya makalah seminar yang berjudul "Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) dapat diselesaikan sesuai dengan semestinya. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Penyusunan makalah skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan materil maupun moril dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
- 2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- 3. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M. Ak. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- 4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku Dosen pembimbing yang memberi petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc selaku Co Dosen pembimbing yang memberi petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Teman-teman sekelas yang saya sayangi.
- 7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- 8. Seluruh staf Tata Usaha (TU) atas segala bantuannya.
- 9. Kedua Orang tua saya atas segala doa dan dorongan spiritual maupun material yang merupakan anugerah yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga selesainya skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, baik dari isi, bahasa maupun penulisannya. Untuk itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih semoga skripsi ini berguna bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Bogor, April 2021

Ayu Lestari

DAFTAR ISI

JUDUL					
LEMBA	R PEN	NGESAHAN SKRIPSI			
LEMBA	R PEN	NGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGAKAN			
LEMBA	R PEI	RNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA			
HAK CI	PTA				
ABSTRA	ΛK				
KATA P	ENGA	ANTAR			
DAFTAI	R ISI				
DAFTAI	R TAB	BEL			
DAFTAI	R GAN	MBAR			
DAFTAI	R LAM	IPIRAN			
BAB I	PFN	NDAHULUAN			
DAD I		Latar Belakang Penelitian			
	1.2				
	1.2	1.2.1 Identifikasi Masalah			
		1.2.2 Perumusan Masalah			
	1.3	Tujuan dan Maksud Penelitian			
	1.0	1.3.1 Maksud Penelitian			
		1.3.2 Tujuan Penelitian			
	1.4	Kegunaan Penelitian			
		1.4.1 Kegunaan Akademis			
		1.4.2 Kegunaan Praktik			
BAB II	TINI	IJAUAN PUSTAKA			
DAD II	2.1 Pajak Penghasilan Badan				
	2.1	2.1.1 Subjek Pajak Badan			
		2.1.2 Objek Pajak Badan			
		2.1.3 Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan			
		2.1.4 Tarif Wajib Pajak Badan			
		2.1.5 Besarnya Pengenaan PPh			
	2.2	Struktur Modal			
	2.3	Manajemen Laba			
	2.3	2.3.1 Pengertian Manajemen Laba			
		2.3.2 Motivasi Manajemen Laba			
		2.3.3 Pola Manajemen Laba			
		2.3.4 Teknik Manajemen Laba			
		2.3.5 Teknik Pendeteksian Manajemen Laba			
	2.4	Penelitian Sebelumnya			
	2.5	Kerangka Pemikiran			

		2.5.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak	
		Penghasilan Badan	26
		2.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak	
		Penghasilan Badan	27
		2.5.3 Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba	
		Secara Simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan	27
	2.6	Hipotesis Penelitian	28
BAB III	ME'	TODE PENELITIAN	
	3.1	Jenis Penelitian	29
	3.2	Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	29
	3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
	3.4	Operasionalisasi Variabel	30
	3.5	Populsi dan Sampel	30
		3.5.1 Metode Penarikan Sampel	31
		3.5.2 Metode Pengolahan Data	32
		3.5.3 Metode Pengolahan / Analisis Data	33
		3.5.4 Uji Hipotesis	33
BAB IV	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Deskripsi Data	35
	4.2	Uji Persyaratan Analisis	39
	4.3	Pengujian Hipotesis	43
	4.4	Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda	44
	4.5	Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi	45
	4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V	KES	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1	Kesimpulan	49
	5.2	Saran	49
DAFTAR	PUS'	TAKA	
DAFTAR	RIW	AYAT HIDUP	
LAMPIR	AN		

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Property dan Real	
	Estate Dalam Triliun Rupiah	3
Tabel 2.1	Pengenaan PPh Final	10
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 3.2	Proses Pengambilan Sampel	30
Tabel 3.3	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	31
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Struktur Modal (DER)	36
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Manajemen Laba	37
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Pajak Penghasilan	39
Tabel 4.4	Uji Normalitas DER	40
Tabel 4.5	Uji Normalitas Manajemen Laba	40
Tabel 4.6	Uji Normalitas Pajak Penghasilan Padan	41
Tabel 4.7	Nilai Tolerance dan VIF	41
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	42
Tabel 4.9	Hasil Uji F dan Uji t	43
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	44
	Hasil Uji Korelasi (R)	45
	Nilai Koefisien Korelasi	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-Rata Struktur Modal (DER) Perusahaan Property dan Real			
	Estate Periode 2014 - 2018	4		
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	28		
Gambar 4.1	Struktur Modal Tahun 2014 - 2018	35		
Gambar 4.2	Manajemen Laba Tahun 2014 - 2018	37		
Gambar 4.3	Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2014 - 2018	38		
Gambar 4.4	Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskesdastisitas	42		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Struktur Modal, Manajemen Laba Dan Pajak			
	Penghasilan Badan			
Lampiran 2	Nilai Struktur Modal Perusahaan	Property dan Real Estate di		
	Bursa Efek Indonesia			
Lampiran 3	Hasil Olah Data Dengan SPSS			

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terliabilitas oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Peran serta wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan cara patuh membayar pajak (Saputra dan Asyik, 2017).

Pada era globalisasi Indonesia dihadapkan dengan perekonomian yang tidak stabil. Dengan semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumberdaya alam sebagai pendapatan negara, dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pajak berkontribusi lebih banyak dibandingkan dengan sektor penerimaan negara lainnya. Menurut UU No. 36 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terliabilitas oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran negara.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Beban pajak merupakan suatu hal yang krusial bagi perusahaan, karena apabila beban pajak semakin tinggi maka laba bersih yang nantinya akan diterima oleh perusahaan akan berkurang. Dalam membayar pajak perusahaan perlu memahami peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, pemerintah melakukan perbaikan dalam penerimaan

pajak dengan membuat kebijakan-kebijakan di dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak dilakukan melalui perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakan hukum pajak.

Pada dasarnya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pihak penerima pajak dan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak. Pemerintah sebagai pihak pertama pajak pasti akan memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak akan meminimalkan pembayaran pajak, sehingga terjadi indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena setiap perusahaan menganggap pajak itu sebagai beban yang harus dibayarkan tanpa memperoleh manfaat langsung atas beban yang dibayarkan tersebut.

Cara meminimalisir beban pajak yang umum digunakan oleh perusahaan yang masih diperbolehkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan memainkan tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat mensiasati dengan menggunakan teknik keuangan yang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan menggunakan utang. Sehingga liabilitas menjadi struktur modal dalam perusahaan. Liabilitas merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Semakin besar sumber modal dari utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Dengan demikian beban perusahaan juga semakin besar dan beban pajak semakin rendah. Modal dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber internal perusahaan yang berasal dari arus kas bersih dari hasil usaha dan sumber eksternal perusahaan melalui penerbitan saham yang baru atau mencari liabilitas melalui kreditur, baik dari lembaga keuangan atau dengan menerbitkan obligasi di pasar modal. Permasalahan yang sebenarnya akan muncul setelah perusahaan melakukan dana untuk modal, yaitu bagaimana komposisi modal atau lebih sering dikenal dengan istilah struktur modal perusahaan.

Menurut Rodoni dan Ali (2015) Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan atau paduan sumber yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan labanya, perusahaan harus mampu menilai dan mengelola struktur modalnya yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dan memahami resiko yang akan ditanggungnya. Liabilitas merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Liabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 2 proksi, yaitu *Long Term Debt To Asset Ratio* (LDAR), dan *Debt To Equity Ratio* (DER). Penggunaan liabilitas sebagai sumber pendanaan perusahaan memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan modal dari liabilitas ketika semakin besar sumber modal dari liabilitas maka semakin kecil beban pajak, semakin besar bunga liabilitas perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008 yang

menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam situasi tertentu, keadaan inilah yang dapat mendorong adanya penggunaan liabilitas yang semakin besar di dalam komponen struktur modal perusahaan. Dengan menggunakan liabilitas sebagai struktur modal perusahaan maka perusahaan mendapatkan biaya tambahan yakni biaya bunga, biaya bunga akan dibayarkan oleh perusahaan setiap periode sesuai dengan umur utang.

Dalam membayar pajak perusahaan tentunya akan dihitung berdasarkan laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak perusahaan akan berkurang ketika struktur modal perusahaan menggunakan liabilitas dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Sehingga menggunakan liabilitas dalam membiayai operasional perusahaan menjadi salah satu cara perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, karena itu dapat menambah biaya usaha. Penggunaan liabilitas oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha.

Selain memanfaatkan kebijakan bunga atas liabilitas yang dapat dijadikan pengurang beban pajak, cara lain yang juga digunakan untuk mengurangi beban pajak yakni dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan dengan sengaja, sesuai dengan prinsip akuntansi untuk mengarahkan tingkatan laba yang dilaporkan.

Menurut Fahmi (2013) manajemen laba didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dihendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management). Tindakan earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang menyajikan data-data kuantitatif atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selain itu laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihakpihak yang berkepentingan dengan perusahaan, antara lain pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu manajemen. Pihak eksternal adalah pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, pemasok, konsumen dan masyarakat. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba yang disajikan pada laporan laba/rugi.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sektor Property dan Real Estate dalam triliun rupiah

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Capaian	30,1	33,4	29,1	24,8	19,7
Jumlah Wajib Pajak	2.723	2.892	2.999	3.016	3.206

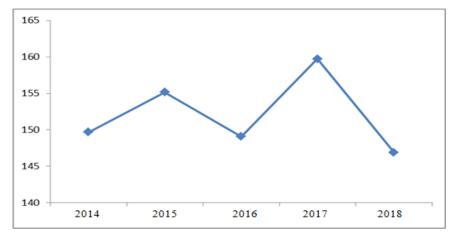
Sumber: m.katadata.co.id 2018. Data Diolah, 2020.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian penerimaan pajak sektor property dan real estate selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Direktorat Jendral (Ditjen) pajak menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor property anjlok tahun lalu.

Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai 19,7 triliun atau turun 20,43% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 24,8 triliun.

Jadi sektor perumahan, property, merupakan salah satu yang menyokong (perekonomian). Untuk bisa sampai ke sana, yang bisa diharapkan, industri masih tetap bisa tumbuh meski tidak bisa diharapkan terlalu tinggi. Sektor industri real dan estate diperkirakan meningkat pada dari tahun ke tahun. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak positif pada optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ekonomi diperkirakan akan stabil hingga akhir tahun jika pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan yang berlaku.

Data yang menunjukkan stuktur modal (DER) pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BEI Periode (2014-2018). Data Diolah, 2020.

Gambar 1.1 Rata-Rata Struktur Modal (DER) Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2014 – 2018

Dari gambar di atas terlihat bahwa stuktur modal (DER) perusahaan perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018 setiap tahunnya mengalami fluktuasi jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal berfluktuasi naik turun.

Laporan laba/rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang sangat penting, karena di dalamnya mengandung informasi laba yang bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi laba juga dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi yang membantu investor maupun pihak lain dalam menilai *earnings power* (kemampuan menghasilkan laba) perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, laba pada umumnya dipandang sebagai dasar untuk perpajakan, penentu dari kebijakan, pembayaran dividen, dan pengambilan keputusan. Adanya kecenderungan

memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen. Khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong munculnya earnings management (manajemen laba). Praktik manajemen laba dilakukan guna merekayasa angka laba perusahaan, perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba berdasarkan scaled earnings changes. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah didistribusikan secara merata, atau mereflesikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat (Sulistyanto, 2018).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmadani (2015) tentang pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas yang menunjukan bahwa hasil debt equity ratio berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang, yang berarti semakin besar debt to equity ratio maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang, Azhari (2015) tentang pengaruh debt equity ratio terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas dan manajemen laba mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Simamora dan Ryadi (2015) tentang pengaruh debt equity ratio terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas yang menunjukan hasil bahwa debt equity ratio berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas dan manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka skripsi ini mengambil judul "Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan sub sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapat penurunan pendapatan pajak pemerintah pada perusahaan sub sektor property dan real estate di tahun 2018 disisi lain jumlah wajib pajak meningkat.
- 2. Penggunaan liabilitas dapat menjadikan alternatif dalam meminimalisir pembayaran pajak.
- 3. Stuktur modal (DER) perusahaan perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 2018 setiap tahunnya mengalami fluktuasi jadi

dapat disimpulkan bahwa proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal berfluktuasi naik turun.

1.2.2 Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan maka masalah dirumuskan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

- 1. Apakah struktur modal yang diproksikan dengan DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?
- 2. Apakah manajemen laba yang diproksikan dengan *profit for the period* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?
- 3. Apakah struktur modal yang diproksikan dengan DER dan manajemen laba yang diproksikan dengan *profit for the period* secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi melalui BEI yang dibutuhkan sebagai sarana dalam melakukan penelitian. Data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam proses pembahasan mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sub sektor sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi permasalahan yang sesungguhnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menguji pengaruh struktur modal (DER) terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI.
- 2. Menguji pengaruh manajemen laba (*profit for the period*) terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI.
- 3. Menguji pengaruh struktur modal (DER) dan manajemen laba (*profit for the period*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran sebagai perbandingan dan pengembangan terhadap pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang. Dan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perusahaan dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

2. Bagi pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

3. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan menambah wawasan pengetahuan mengenai relevansi antara teori yang didapat melalui pembelajaran dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

4. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan Badan

Pengertian pajak penghasilan adalah, pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Saiful, 2014). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

2.1.1 Subjek Pajak Badan

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak badan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu sebagai berikut:

- 1. Wajib pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- 2. Wajib pajak badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.2 Objek Pajak Badan

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3 Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun, baik yang sudah memiliki NPWP atau belum, sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Adapun hak dari wajib pajak dalam perpajakan, yaitu:

- 1. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- 2. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT.
- 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- 4. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak.
- 5. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
- 6. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 7. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

2.1.4 Tarif Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh 41

- Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua
 - Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak tahun pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.
- 2. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh
 - Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai tahun pajak 2010, tarif untuk WP Badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham lain baik orang pribadi ataupun badan.
 - c. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Tarif Pasal 31E UU PPh.

Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010).

WP Badan yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar. Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Ditjen Pajak Nomor SE 66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan 'peredaran bruto' adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2.1.5 Besarnya Pengenaan PPh

Pengenaan PPh dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima baik oleh orang pribadi maupun badan untuk lebih jelasnya untuk tarif pajak dari masing-masing akan diuraikan di bawah ini:

- 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana ("*initial public offering*").

Tabel 2.1 Pengenaan PPh Final

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:

- Tidak mewah
- Mewah, yaitu:
 - Rumah beserta tanahnya, harga jual/harga pengalihan lebih dari Rp 10 M dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - Apartemen kondominium, & sejenisnya, harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 M dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².

PPh Pasal 4 (2) (sifat final) = 5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB kecuali:
 - Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan pejabat yang bersangkutan;
 - Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut

risalah lelang tersebut.

- 2. NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya.
- 3. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.

Atas Rumah mewah, selain dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) juga dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong mewah sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM).

Pengalihan hak atas rumah susun dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- 1. WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran.
- Rumah sederhana ini terdiri atas rumah sederhana sehat dan rumah inti tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3. Rumah susun sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk rumah susun sederhana milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPH Pasal 4(2) (sifat final) = 1% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB kecuali:

- Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
- Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segalanya perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya.

Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

2.2 Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan atau perpaduan antara modal asing dengan modal sendiri (Husnan, 2014), dengan kata lain struktur modal merupakan proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal.

Dengan demikian struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur keuangan. Struktur keuangan mencerminkan perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 2014). Struktur modal merupakan kombinasi liabilitas dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan, tidak seperti rasio liabilitas yang hanya menggambarkan target komposisi liabilitas dan ekuitas dalam jangka panjang pada suatu perusahaan (Arifin, 2015). Brigham dan Houston (2016) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu:

1. Stabilitas Penjualan

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Dengan demikian apabila penjualan stabil maka semakin tinggi struktur modalnya. Jika struktur modal semakin tinggi ini berarti struktur aset juga semakin tinggi dan keadaan tersebut berarti semakin tinggi pula aset tetap yang dapat dijadikan anggunan liabilitas oleh perusahaan tersebut, dan sebaliknya struktur aset yang semakin rendah, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka panjang perusahaan.

2. Struktur Aset

Perusahaan yang asetnya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan utang. Struktur aset menggambarkan proporsi antara aset total aset dengan aset tetap perusahaan. Sebab perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan lebih mudah mendapatkan modal dari luar perusahaan.

3. Leverage Operasi

Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan dengan *leverage* operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar *leverage* keuangan karena ia akan mempunyai resiko bisnis yang lebih kecil. Dengan menggunakan *operating leverage*, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.

4. Tingkat Pertumbuhan

Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal, namun pada saat yang sama perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang pesat sering menghadapi ketidakpastian lebih yang besar yang cenderung mengurangi keinginannya untuk menggunakan liabilitas. Pertumbuhan dapat mempengaruhi kepercayaan perusahaan kreditur terhadap perusahaan dan kesediaan pemodal untuk memberikan pendanaan melalui liabilitas jangka panjang

5. Profitabilitas

Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi hanya menggunakan liabilitas yang relatif kecil. Pembenaran teoretis mengenai hal ini belum ada, namun penjelasan praktis atas kenyataan ini adalah bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan memang tidak memerlukan banyak pembiayaan dengan liabilitas. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal.

6. Pajak

Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacammacam, mulai dari pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai.

7. Pengendalian

Pengaruh liabilitas melawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. Apabila manajemen saat ini mempunyai hak suara untuk mengendalikan perusahaan (mempunyai saham lebih dari 50%) tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk membeli saham tambahan, mereka mungkin akan memilih liabilitas untuk pembiayaan baru. Di lain pihak, manajemen mungkin memutuskan untuk menggunakan ekuitas jika kondisi keuangan perusahaan sangat lemah sehingga penggunaan liabilitas dapat membawa perusahaan pada risiko kebangkrutan, karena jika perusahaan bangkrut maka para manajer akan mengambil risiko pengambilalihan. Jadi, pertimbangan pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan liabilitas atau ekuitas karena jenis modal yang memberi perlindungan terbaik bagi manajemen. pertimbangan pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan liabilitas atau ekuitas karena jenis modal yang memberi perlindungan terbaik bagi manajemen.

8. Sikap Manajemen

Di dalam dunia bisnis, sekecil apapun bentuk bisnis tersebut, sebuah sistem manajemen yang baik sangat penting untuk diaplikasikan. Namun, seringkali banyak pebisnis yang meremehkan pentingnya manajemen ini dengan tidak menerapkannya di dalam usaha mereka. Akhirnya, bisnis yang telah dibangun tersebut berada di ujung tanduk dan tak jarang terancam bangkrut. Sebelum mencapai titik kebangkrutan, ada beberapa tanda-tanda yang dapat dideteksi bila kalian memperhatikan bisnismu dengan cermat.

9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Peringkat

Tanpa memperhatikan analisis para manajer atas faktor-faktor penggunaan liabilitas yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Dalam sebagian besar kasus, perusahaan membicarakan struktur modalnya dengan memberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat serta sangat memperhatikan masukan yang diterima.

10. Kondisi Pasar

Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan.

11. Kondisi Internal Perusahaan

Lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang dengan terkait langsung kegiatan sehari hari organisasi, mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga "denyut nadi" nya organisasi. Sedangkan Lawrence dan William (2018) mendefinisikan lingkungan internal perusahaan sebagai suatu proses dengan mana perencana strategi mengkaji pemasaran, dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan dimana perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang penting sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan.

12. Fleksibilitas Keuangan

Mempertahankan fleksibilitas keuangan, jika dilihat dari sudut pandang operasional berarti mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai. Struktur modal yang optimal terjadi pada *leverage* keuangan tingkat tertentu. *Leverage* keuangan merupakan penggunaan dana, dimana dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan beban tetap (Martono dan Harjito, 2016). Dalam rangka mencapai struktur modal yang optimal para ahli merumuskan teori-teori tentang struktur modal, berikut ini teori struktur modal yaitu:

a. Teori *Trade-Off*

Sejumlah pendapat terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori *trade-off* dari liabilitas. Perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dan liabilitas dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi (Brigham dan Houston, 2016). Biaya dari liabilitas dihasilkan dari:

- Peningkatan kemungkinan kebangkrutan yang disebabkan oleh liabilitas yang tergantung pada tingkat risiko bisnis dan risiko keuangan.
- 2) Biaya agen dan pengendalian tindakan perusahaan.
- 3) Biaya yang berkaitan dengan manajer yang mempunyai informasi lebih banyak tentang prospek perusahaan daripada investor (Sriwardany, 2016).

Pendekatan Modigliani dan Miller dalam kondisi ada pajak penghasilan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat terus karena penggunaan liabilitas yang semakin besar, tetapi perlu diingat bahwa nilai sekarang dari kesulitan keuangan dan nilai sekarang biaya keagenan dapat mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan yang memiliki liabilitas (Sartono, 2016). Teori ini menganggap bahwa penggunaan liabilitas 100 persen sulit dijumpai. Kenyataannya semakin banyak liabilitas, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Satu hal yang penting bahwa dengan meningkatnya liabilitas, maka semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. Beban yang harus ditanggung saat menggunakan liabilitas yang lebih besar adalah biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. Biaya kebangkrutan dapat cukup signifikan sehingga mencapai 20 persen nilai perusahaan. Biaya tersebut mencakup dua hal:

- 1) Biaya langsung: biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi, pengacara, dan lainnya yang sejenis.
- 2) Biaya tidak langsung: biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal.

b. Teori Packing Order

Pandangan alternatif mengenai cara manajer mendanai anggaran modal perusahaannya yang dikenal dalam literatur ekonomi keuangan sebagai teori *pecking order*. Teori *pecking order* menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih membelanjai perusahaan dengan dana internal yaitu yang berasal dari laba ditahan dan depresiasi aliran kas (Ekawati, 2014). Teori struktur modal *pecking order* diringkaskan dalam 4 bagian di bawah ini:

- 1) Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi.
- 2) Perusahaan lebih menyukai dana internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
- Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan pertama akan memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir.
- 4) Dengan semakin banyaknya dana eksternal yang dibutuhkan untuk mendanai proyek dengan nilai sekarang positif, pendapatan *pecking* order akan diikuti, ini berarti lebih menyukai liabilitas yang berisiko artinya pada konvertibel, modal preferen, dan modal biasa sebagai pilihan terakhir.

c. Teori Arus Kas Bebas

Keown (2015) mendefinisikan arus kas bebas sebagai kas lebih yang dibutuhkan untuk mendanai semua proyek yang memiliki nilai sekarang bersih saat didiskonto pada biaya model yang relevan dan mengemukakan arus kas bebas yang besar akan mengarah pada perilaku manajer yang salah dan keputusan yang buruk bukan demi kepentingan pemegang saham biasa perusahaan, dengan kata lain manajer memiliki insentif untuk memegang arus kas, bukan mengolahnya misalnya menjadi pembayaran dividen tunai yang lebih tinggi.

d. Signalling Theory

Signalling theory mendasarkan pada asumsi bahwa manajer memiliki lebih baik mengenai kesempatan informasi yang perusahaannya daripada investor dan tindakan manajer didasarkan pada kepentingan terbaik untuk para pemegang saham yang ada. Brigham dan Houston (2016) menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan utang. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer dan pemegang saham tidak mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. Ada informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham tidak tahu informasi tersebut sehingga terdapat informasi yang tidak simetri (asymmetric information) antara manajer dan pemegang saham, akibatnya ketika struktur modal perusahaan mengalami perubahan, hal itu dapat membawa informasi kepada pemegang saham yang akan mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Berdasarkan kondisi di atas dapat dinyatakan bahwa perilaku manajer dalam hal menentukan struktur modal, dapat dianggap sebagai sinyal oleh pihak luar (Mamduh, 2016).

Struktur keuangan adalah cara bagaimana perusahaan membiayai asetnya dan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan dari posisi keuangan yang terdiri dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham. Sedangkan struktur modal perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari kewajiban jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas pemegang saham. Jadi, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Sedangkan struktur ekuitas adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh liabilitas, ekuitas saham preferen, dan saham biasa.

Pada dasarnya, keputusan pendanaan (*financing*) perusahaan berkaitan dengan penentuan sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai usulan-usulan investasi yang telah diputuskan sebelumnya. Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat disediakan atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari sumber internal, maka perusahaan tersebut melakukan pendanaan internal (*internal financing*) yaitu dalam bentuk laba ditahan, sebaliknya, jika perusahan memenuhi kebutuhan dananya dari sumber eksternal, maka perusahaan tersebut melakukan pendanaan eksternal (*external financing*). Pemenuhan kebutuhan dana secara eksternal dipisahkan menjadi 2 yaitu pembiayaan liabilitas (*debt financing*) dan pendanaan modal sendiri (*equity financing*). Pembiayaan liabilitas diperoleh melalui pinjaman, sedangkan pendanaan modal sendiri berasal dari emisi atau penerbitan saham.

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah liabilitas jangka panjang dengan modal sendiri. Proksi struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio* (DER), ini juga mengacu pada penelitian Simatupang (2016). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan liabilitas) terhadap total *shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan, ini juga mengacu pada penelitian secara matematis DER dapat dirumuskan sebagai berikut (Robert, 2017):

$$\textit{Debt to Equity Ratio} \left(\textit{DER}\right) = \frac{\textit{Total Debt}}{\textit{Total Equity}}$$

Keterangan:

Total Debt = total liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang

Total Equity = total modal sendiri

Total debt merupakan total liabilities (baik liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang) sedangkan total shareholder's equity merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total liabilitas (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar

dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) (Robert, 2017).

Jadi, berdasarkan beberapa referensi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur modal adalah proposi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal, dengan demikian struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi liabilitas jangka pendek. Dimensi dari struktur modal yaitu: 1) Modal asing, 2) Modal sendiri, 3) Total hutang, 4) Total ekuitas.

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2013) secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya menajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus (Rahmawati, 2017). Manajemen laba digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik. Adanya keuangan yang baik tentu saja para investor tertarik membeli saham diperusahaan tersebut karena dinilai memiliki kinerja yang baik.

Menurut Wirakusuma, (2016) manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Riske dan Basuki (2013) mengemukakan manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan serta dapat menggangu pemakai laporan keuangan yang percaya pada angka hasil rekayasa tersebut sebagai angka real atau tanpa rekayasa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

2.3.2 Motivasi Manajemen Laba

Secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan *creative accounting* atau manajemen laba menurut Sulistiawan, Januarsi dan Alvia (2016) yaitu:

1. Motivasi Bonus.

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2. Motivasi Utang.

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkah melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul.

3. Motivasi Pajak.

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go puhlic* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Motivasi Initial Public Offering (IPO).

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha

dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

5. Motivasi Pergantian Direksi.

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

6. Motivasi Politis.

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan strategis semisal perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa motivasi yang mendorong terjadinya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari motivasi perpajakan (*taxation motivations*). Scott (2012) mengemukakan bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Intinya manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

2.3.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2012) ada empat pola manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:

1. Taking a bath

Manajemen laba dengan pola *taking a bath* biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan reorganisasi termasuk saat pergantian CEO. *Taking a bath* dilakukan dengan melaporkan rugi yang besar pada periode sekarang.

2. Income Minimization

Income minimization adalah pola manajemen laba yang serupa dengan taking a bath namun dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim. Income minimization dilakukan dengan memilih kebijakan yang dapat meminimalkan laba seperti penghapusan beberapa aset dan intangible asset, beban pemasaran, dan beban R & D.

3. *Income Maximization*

Manajer melakukan *income maximization* dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan agar bisa mencapai target. Namun *income maximization* yang dilakukan akan berhenti ketika sudah mencapai target yang ada dalam skema bonus.

4. Income Smoothing

Income smoothing adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan.

2.3.4 Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu kegiatan intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan. Menurut Asyik dan Soelistyo (2015) manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya:

- a. Mengubah metode depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*)
- b. Mengubah periode depresiasi

2. Memainkan kebijakan perkiraaan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piliabilitas tidak tertagih
- b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
- c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya:

- a. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
- c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.

- d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
- e. Mengatur saat penjualan aset tetap yang sudah tidak terpakai.

2.3.5 Teknik Pendeteksian Manajemen Laba

Pada penelitian skripsi ini, manajemen laba dideteksi dengan menggunakan profit for the period.

Model pengukuran atas *profit for the period* pada penelitian ini dijelaskan dengan formula sebagai berikut:

 $Profit for the period = \underline{Laba\ setelah\ pajak}$ Penjualan

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan diambil poin-poin penting untuk dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan. Secara ringkas, studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Publikasi
1.	Putri	Pengaruh Struktur	Struktur Modal	Secara simultan	Jurnal Riset
	Hayyatus	Modal, Return On	(X_1) , Return On	Struktur Modal, Return	Manajemen
	Sholihah, Hj.	Equity (ROE) dan	Equity (ROE)	on Equity (ROE) dan	Prodi
	Jeni Susyanti	Earning Per Share	(X_1) , Earning	Earning per share	Manajemen
	dan Budi	(Eps) Terhadap	Per Share (Eps)	(EPS) berpengaruh	Fakultas
	Wahono	Pajak Penghasilan	(X_3) , Pajak	terhadap Pajak	Ekonomi
	(2018)	(PPH) Badan	Penghasilan	Penghasilan (PPh)	Unisma Tahun
		"Studi Pada	(PPH) Badan	Badan. Variabel <i>Debt</i>	2018
		Perusahaan	(Y)	To Asset Ratio, Debt To	
		Manufaktur Sub		Equity Ratio dan,	
		Sektor Industri		Return on Equity	
		Barang Konsumsi		berpengaruh terhadap	
		Yang Terdaftar di		pajak penghasilan (PPh)	
		BEI Tahun 2015 –		Badan. Sedangkan	
		2017		variabel Earning per	
				share Secara parsial	
				tidak berpengaruh	
				terhadap pajak	
				penghasilan (PPh)	
				Badan.	
2.	Patar	Pengaruh Struktur	Struktur Modal	Hasil penelitian	JIAFE (Jurnal
	Simamora	Modal Terhadap	(X), PPH Badan	menunjukan bahwa nilai	Ilmiah
	dan	PPH Badan	(Y)	variabel LDAR yaitu	Akuntansi
	Muhamad	Terliabilitas pada		thitung > ttabel atau	Fakultas
	Ressa	Perusahaan		2,384 >2,229 maka H0	Ekonomi)
	Mahardika	Manufaktur Sektor		ditolak yang berarti	Volume 1 No.
	Ryadi (2015)	Industri Semen		LDAR secara parsial	2 Tahun 2015,
		Yang Terdaftar di		berpengaruh terhadap	E-ISSN 2502-
		BEI Periode 2010-		pajak penghasilan badan	4159
		2013		terutang. Untuk nilai	

No.	Penulis	.Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Publikasi
1100	LUMIN	Judui	, arianci		1 thousand
No. 3.	Andy Azhari (2015)	Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terliabilitas (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)	Struktur Modal (X ₁), Manajemen Laba (X ₂), Pajak Penghasilan Badan (Y)	variabel DER yaitu thitung > ttabel atau 2,350 > 2,229 maka H0 ditolak yang berarti DER secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel atau 6,931 > 2,816 artinya LDAR dan DER secara simultan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, (2) DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, (3) LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa long term debt to asset ratio, debt to equity ratio dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa long term debt to asset ratio, debt to equity ratio dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa long term debt to asset ratio, debt to equity ratio dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa long term debt to asset ratio, debt to equity ratio dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada taraf signifikansi 0,001 dengan alpha 5% atau 0,001 < 0,05. Selanjutnya untuk pengujian secara parsial atau uji t dari ketiga variabel independen ditemukan bahwa hanya variabel Long Term Debt to Asset Ratio yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen Pajak Penghasilan Badan Terliabilitas pada taraf signifikansi 0,023	Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Publikasi
				dengan alpha 5% atau (0,023 < 0,05). Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio dan variabel Manajemen Laba secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas perusahaan.	
4	Roni Dwi Laksono (2019)	Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 - 2017	Struktur Modal (X ₁), Profitabilitas (X ₂), Biaya Operasional (X ₃) Pajak Penghasilan Badan (Y)	Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa variabel struktur modal (Leverage), struktur modal (Debt to equity Ratio), biaya operasional, dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, akan tetapi terdapat hasil yang berbeda pada pengujian variabel struktur modal (long term debt to asset ratio) yang menyatakan bahwa variabel struktur modal (long term debt to asset ratio) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.	Universitas Islam Batik Surakarta Tirtayasa Ekonomika Vol. 14, No. 1, April 2019
5	Eliza Tri Widyaningsih (2019)	Pengaruh Manajemen Laba, Debt To Equity Ratio , Dan Return On Asset Terhadap Pph Badan Terutang Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam BEI Sektor Real Estate dan Property Tahun 2015 - 2016	Manajemen Laba (X ₁), DER (X ₂), ROA (X ₃), Pajak Penghasilan Badan (Y)	Pengujian secara parsial atau uji t dari ketiga variabel independen ditemukan bahwa <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen PPh badan terliabilitas pada taraf signifikansi 0,007 dengan alpha 5% atau (0,007 < 0,05). Dan <i>Return On Asset</i> berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen PPh badan terliabilitas pada taraf signifikansi 0,021 denganalpha 5% atau (0,021 < 0,05). Sedangkan variabel	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm 72- 88

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Publikasi
				Manajemen Laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang	
6	Faqiatul Mariya Waharini & Friztina Annisa (2017)	Manajemen Laba Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Pajak	Manajemen Laba (X ₁), Struktur Modal (X ₂), Manajemen Pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifi kan terhadap manajemen pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami trade-off pada saat melakukan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Struktur modal berpengaruh positif signifi kan terhadap manajemen pajak.	Universitas Muhammadiya h Magelang Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Volume 15, Nomor 1, April 2017
7	Fadel Ahmad (2017	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Debt to Equity Ratio (X ₁), Longterm Debt to Asset Ratio (X ₂), Pajak Penghasilan Badan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dan Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang.	Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 2017
8	Made Astrela Widani (2019)	Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur	Struktur modal (X1), capital intensity (X2), ukuran perusahaan (X3) Pajak penghasilan (Y).	Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa variabel struktur modal, capital intensity, dan ukuran perusahaan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur modal, capital intensity, dan ukuran perusahaan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pajak penghasilan.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
9	Chairul Anam, Lustyna Reinsa Zuardi (2018)	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2011-	Current Ratio (X1), Debt To Equity Ratio(X2), Pajak penghasilan badan (Y).	1) Secara parsial, sektor pertambangan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara rasio likuiditas (current ratio) terhadap pajak penghasilan badan terutang.	STIE Al-Anwar Mojokerto Margin Eco Vol. 2 No.l Mei 2018 Hal. 43-68

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Publikasi
10	Sherly (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017)	Profitabilitas (X ₁), Biaya Operasional (X ₂), Dan Struktur Modal (X ₃) Pajak Penghasilan Badan Usaha (Y)	2) Secara parsial, sektor pertambangan memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan antara rasio solvabilitas (debt to equity ratio) terhadap pajak penghasilan badan terutang. 3) Secara parsial, sektor pertambangan memiliki pengaruh positif dan signifikan antara biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, dan profitabilitas, biaya operasional, struktur	Stie Multi Data Palembang Program Studi Akuntansi Palembang 2019
				modal mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pajak	
				penghasilan badan	

2.5 Kerangka Pemikiran

Dari berbagai studi terdahulu yang hasilnya beragam, penelitian ini akan berkonsentrasi pada pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya mangkaitkan variabel bebas dengan variabel terikat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan

Debt to equity ratio adalah perbandingan rasio total liabilitas dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total liabilitas dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham.

Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 sedangkan pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*non-tax deductible*) sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000. Pendanaan yang dominan berasal dari liabilitas akan menimbulkan biaya berupa bunga liabilitas yang tinggi, yang tentunya hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sholihah, Susyanti dan Wahono (2018) menyatakan bahwa variabel *debt to equity ratio* dan, *return on equity* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Selanjutnya penelitian Simamora dan Ryadi (2015) hasil penelitiannya juga menyatakan DER secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel *debt to equity ratio* terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₁: Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

2.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Berbagai metode akuntansi digunakan pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas perusahaan.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₂: Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

2.5.3 Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba secara Simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan

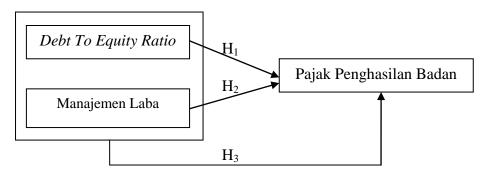
Debt to equity ratio adalah perbandingan rasio total liabilitas dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total liabilitas dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan menyusun struktur modal dan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak.

Penelitian yang dilakukan Azhari (2015). Hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa *long term debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas pada taraf signifikansi 0,001 dengan alpha 5% atau 0,001 < 0,05. Berdasarkan keterkaitan antar variabel *debt to equity ratio* dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₃: *Debt to equity ratio* dan manajemen laba secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

2.6 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *debt to equity ratio* (X_1) dan manajemen laba (X_2) . Sedangkan variabel terikatnya ialah pajak penghasilan badan (Y). Dari variabel-variabel tersebut tersusun hipotesis penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap pajak penghasilan

badan.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap pajak penghasilan

badan

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh debt to equity ratio dan manajemen laba secara

simultan terhadap pajak penghasilan badan

Hipotesis yang telah tersusun selanjutnya akan diuji sesuai dengan metodologi penelitian untuk mengetahui mana yang yang diterima dan ditolak. Penjelasan mengenai metodologi penelitian akan disajikan di bab berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode *explonatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian dengan metode statistik kuantitatif yang bertujuan mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kajian dalam penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan.

3.2 Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian tersebut. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Objek penelitian ini adalah laporan struktur modal, manajemen laba dan pajak penghasilan badan perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dari cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah tersusun, bukan data primer yang langsung dari lapangan. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak angsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain. Data dalam penelitian ini adalah angka-angka (statistik) laporan perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Dengan demikian, dilihat dari waktu pengumpulannya, yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, kumpulan data dalam rentang berurutan pada periode tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu data berupa angkangka.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini digunakan variabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Struktur	Debt To Equity		
	Modal (X ₁)	Ratio (DER),	Debt to Equity Ratio (DER) = Total Debt	Rasio
			Total	
			Equity	
2	Manajemen	Profit for the period		
	Laba (X ₂)	Keuntungan		Rasio
		periode tertentu	Profit for the period = <u>Laba setelah pajak</u>	
			Penjualan	
3	Pajak	(Tax)	Pajak yang dikenakan terhadap laba yang	Nominal
	Penghasilan	Pajak Perusahaan	dihasilkan atau diperoleh perusahaan	
	Badan (Y)		dalam satu tahun pajak.	

Sumber: Penelitian Terdahulu, Data Diolah 2020

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan perusahaan property dan real estate *go public* yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini akan dipilih sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2009). Dengan kriteria penelitian sebagai berikut:

- 1. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang go public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.
- 2. Informasi perusahaan dengan informasi lengkap dari tahun 2014-2018.
- 3. Perusahaan property dan real estate yang memiliki nilai perubahan aset yang positif tahun 2014-2018.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel dari penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel

\mathcal{E} 1				
No	Karakteristik Sampel	Ket		
1	Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	61		
	dengan pengklasifikasian ICMD (Indonesian capital marketdirectory) Tahun			
	2014-2018			
2	Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak menerbitkan laporan keuangan	20		
	secara lengkap dari Tahun 2014-2018			
3	Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak memiliki nilai perubahan aset	9		
	yang positif Tahun 2014-2018			
	Jumlah Sampel Penelitian (Perusahaan Manufaktur)	32		

Sumber: Indonesian Capital Market Directory Tahun 2014-2018, Data Diolah 2020

Metode penarikan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Tabel berikut menunjukan daftar perusahaan sektor property dan real estate yang digunakan menjadi sampel dalam penelitian yang berjumlah 32 perusahaan. Sampel ini diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas.

Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	Alam Sutera Realty Tbk.
2	Bekasi Asri Pemula Tbk.
3	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
4	Bukit Darmo Property Tbk.
5	Sentul City Tbk.
6	Bumi Serpong Damai Tbk.
7	Cowell Development Tbk.
8	Ciputra Development Tbk.
9	Ciputra Property Tbk.
10	Ciputra Surya Tbk.
11	Duta Anggada Realty Tbk.
12	Intiland Development Tbk.
13	Duta Pertiwi Tbk.
14	Bakrieland Development Tbk.
15	Fortune Mate Indonesia Tbk.
16	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
17	Perdana Gapuraprima Tbk.
18	Jaya Real Property Tbk.
19	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
20	Lamicitra Nusantara Tbk.
21	Laguna Cipta Griya Tbk.
22	Lippo Cikarang Tbk.
23	Lippo Karawaci Tbk.
24	Modernland Realty Tbk.
25	Metropolitan Kentjana Tbk.
26	Indonesia Prima Property Tbk
27	Pakuwon Jati Tbk.
28	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
29	Roda Vivatex Tbk.
30	Danayasa Arthatama Tbk.
31	Suryamas Dutamakmur Tbk.
32	Summarecon Agung Tbk.

Sumber: BEI, Data Diolah 2020

3.5.1 Metode Penarikan Sampel

Sampel penelitian ditarik menggunakan teknik *non-probability sampling* atau penarikan sampel secara tak acak dengan prosedur *judgment / purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Perusahaan property dan real estate *go public* yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.
- 2. Perusahaan konsisten termasuk dalam kategori penerbit laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2014-2018.

3. Perusahan sampel menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap beserta data yang dibutuhkan selama periode penelitian tahun 2014-2018 dan bisa diakses melalui website.

3.5.2 Metode Pengolahan Data

Dalam uji regresi linear terdapat asumsi-asumsi tertentu yang harus dipenuhi, yaitu bahwa model penelitian harus terbebas dari beberapa masalah seperti normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Asumsi –asumsi tersebut perlu dipenuhi agar regresi memenuhi prinsip *best, linear, unbiased, estimator*, BLUE atau *minimum variance linear unbiased*, (Greene, 2012). Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip itu terpenuhi, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan tingkat nilai pada 0,05. Jika nilai si yang dihasilkan > 0,05 maka data tervalidasi memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Menurut Ghozali (2016), variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai *Tolerance*: Tidak terjadi *multikolinearitas*, jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan terjadi *multikolinearitas*, jika nilai *Tolerance* lebih kecil atau sama dengan 0,10.

Pengambilan Keputusan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*): Tidak terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00, dan terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) uji *autokorelasi* bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan uji statistik Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

H0: Tidak Ada Autokorelasi

HA: Ada Autokorelasi

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif,

Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,

Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidakada kesimpulan pasti.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika (4 -d) < dL maka terdapat auto korelasi negatif,

Jika (4-d) > dU maka tidak terdapat auto korelasi negatif,

Jika dL < (4-d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak ada kesimpulan pasti.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y, maka diidentifikasikan angka 0 pada tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5.3 Metode Pengolahan / Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tingkat 0,05. Analisis regresi linear berganda digunakan jika variabel bebas > 1. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, struktur modal (X_1) dan manajemen laba (X_2) . Persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Serta diketahui bahwa:

Y = Pajak penghasilan badan

 X_1 = Struktur modal X_2 = Manajemen laba

b₁ = Koefisien regresi struktur modal

b₂ = Koefisien regresi manajemen laba

 $\alpha = Konstanta$

 β = Koefesien regresi

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefesien determinasi untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Cara yang dilakukan dengan melihat nilai R² pada *output* tabel *Model Summary*.

2. Uji F

Uji F untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen, yaitu struktur modal (X_1) dan manajemen laba (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan (Y). Cara yang dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} . Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf si 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Apabila Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Ho struktur modal dan manajemen modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan dan Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka struktur modal dan manajemen modal secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

3. Uji t

Uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) tehadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan apabila tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf si 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kriteria penilaian jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ada pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan secara parsial jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan secara parsial.

BAB IV

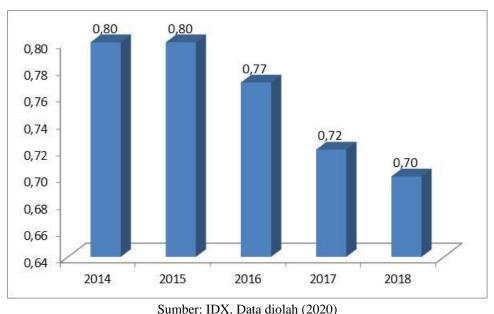
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Sebelum dilakukan analisis inferensial, penelitian ini terlebih dahulu melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan data-data penelitian. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yang meliputi variabel: struktur modal (DER), manajemen laba dan pajak penghasilan badan adapun uraiannya sebagai berikut

1. Struktur modal pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Berdasarkan analisis data pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 menunjukan rata-rata rasio struktur modal untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 menunjukan bahwa berfluktuasi dan cenderung menurun, hal ini dapat dikatakan bahwa struktur modal terendah terjadi pada tahun 2018 dan nilai perusahaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014. Dari data tersebut dapat digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.1 Struktur Modal Tahun 2014 s/d 2018

Berdasarkan pada gambar di atas kondisi struktur modal untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, tahun yang menghasilkan nilai struktur modal tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0.80; sedangkan struktur modal yang paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,70.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini uji desciptive statistics.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Struktur Modal (DER)
Statistics

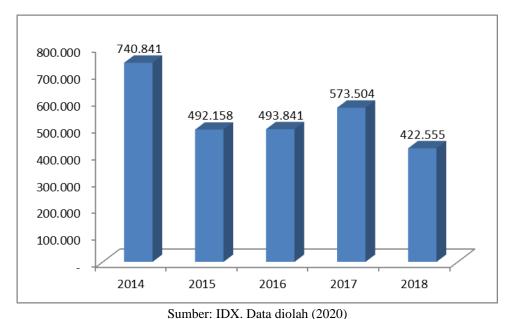
N	Valid	135
	Missing	0
Mear	Î	5304
Medi	an	4005
Mode		-1.35°
Std. [Deviation	.83591
Varia	nce	.699
Rang	je	4.97
Minin	num	-3.91
Maxir	num	1.05
Sum		-71.60

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel diatas menunjukan hasil untuk deskripsi data struktur modal (DER) yaitu nilai rata-rata untuk variabel struktur modal (DER) sebesar -0,5304, nilai tengah -,4005, nilai yang paling sering muncul adalah -1,35, simpangan baku 0,83591, keragaman data struktur modal (DER) diperoleh nilai sebesar 0,699, selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil sebesar 4,97, skor terendah -3,91 dan skor tertinggi sebesar 1,05.

2. Manajemen laba pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Berdasarkan analisis data pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 diperoleh rata-rata manajemen laba untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 menunjukan bahwa berfluktuasi dan cenderung naik, hal ini dapat dikatakan bahwa manajemen laba terendah terjadi pada tahun 2018 dan nilai manajemenn laba yang terjadi pada tahun 2014. Dari data tersebut dapat digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.2 Manajemen Laba Tahun 2014-2018

Berdasarkan pada gambar di atas kondisi manajemen laba untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, tahun yang menghasilkan nilai manajemen laba tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 740.841; sedangkan manajemen laba yang paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 422.555.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini uji desciptive statistics.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Manajemen Laba **Statistics**

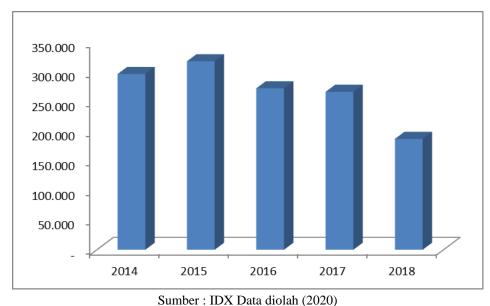
Mana	iemen Laba	
N	Valid	135
	Missing	0
Mean		544579.8593
Media	an	256263.0000
Mode		-724167.00°
Std. D	Deviation	839884.37895
Varia	nce	705405770004.719
Rang	е	5912939.00
Minin	num	-724167.00
Maxin	num	5188772.00
Sum		73518281.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Tabel diatas menunjukan hasil untuk deskripsi data manajemen laba yaitu nilai rata-rata untuk variabel manajemen laba sebesar 544.579,8593 nilai tengah 256.263,00 nilai yang paling sering muncul adalah -724.167,00, simpangan baku 839.884,3789 keragaman data manajemen laba diperoleh nilai sebesar 705.405.770.004,719, selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil sebesar 5.912.939,00, skor terendah -724.167,00 dan skor tertinggi sebesar 5.188.772,00.

3. Pajak penghasilan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Berdasarkan analisis data pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 diperoleh rata-rata pajak penghasilan untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 menunjukan bahwa berfluktuasi dan cenderung naik, hal ini dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan terendah terjadi pada tahun 2018 dan nilai pajak penghasilan yang tertinggi terjadi pada tahun 2015. Dari data tersebut dapat digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.3 Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2014-2018

Berdasarkan pada gambar di atas kondisi pajak penghasilan untuk perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, tahun yang menghasilkan nilai manajemen laba tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 318.103; sedangkan manajemen laba yang paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 187.171.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini uji desciptive statistics.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Pajak Penghasilan Statistics

N	Valid	135
	Missing	0
Mean		53179.9037
Media	an	7636.0000
Mode		.00
Std. D	eviation	101550.67086
Varia	nce	10312538752.356
Rang	е	658627.00
Minim	num	-98864.00
Maxin	num	559763.00
Sum		7179287.00

Tabel diatas menunjukan hasil untuk deskripsi data pajak penghasilan badan yaitu nilai rata-rata untuk variabel pajak penghasilan badan sebesar 53.179,9037 nilai tengah 7.636,00 nilai yang paling sering muncul adalah 0,00, simpangan baku 101.550,67086 keragaman data pajak penghasilan badan diperoleh nilai sebesar 10.312.538.752,356, selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil sebesar 658.627,00, skor terendah -98.864,00 dan skor tertinggi sebesar 559.763,00.

4.2 Uji Persyaratan Analisis

Untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan, perlu dilakukan beberapa teknik analisis data dimana diharuskan melakukan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS 16 dengan metode One Sample Kolmogorov Smirnov (KS). Kriteria uji dari metode KS adalah skor variabel dinilai terdistribusi normal jika derajat signifikansi variabel >0,05.

a. Uji Normalitas Struktur Modal (DER) Berdasarkan hasil analisis data untuk uji normalitas terhadap variabel struktur modal (DER) dengan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Struktur Modal
N		135
Normal Parameters	Mean	5304
	Std. Deviation	.83591
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.060
	Negative	114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.330
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS. Data diolah, (2020)

Hasil tes derajat signifikan sebesar 0,058 atau > 0,05, dengan demikian skor variabel struktur modal (DER) dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Manajemen Laba

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji normalitas terhadap variabel manajemen laba dengan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Manajemen Laba
N		135
Normal Parameters	Mean	544579.8593
	Std. Deviation	8.39884E5
Most Extreme Differences	Absolute	.195
	Positive	.153
	Negative	195
Kolmogorov-Smirnov Z		2.271
Asymp, Sig. (2-tailed)		6.613

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Hasil tes derajat signifikan sebesar 6,613 atau > 0,05, dengan demikian skor variabel manajemen laba dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

c. Uji Normalitas Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil analisa data untuk uji normalitas terhadap variabel pajak penghasilan badan dengan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajak Penghasilan Badan
N		135
Normal Parameters	Mean	53179.9037
	Std. Deviation	101550.67086
Most Extreme Differences	Absolute	.271
	Positive	.271
	Negative	249
Kolmogorov-Smirnov Z		3.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.129

a. Test distribution is Normal. Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Hasil tes derajat signifikan sebesar 0,129 atau > 0,05, dengan demikian skor variabel pajak penghasilan badan dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk dapat menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance* serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Adapun nilai *tolerance* dan VIF dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Struktur Modal	.972	1.028
	Manajemen Laba	.972	1.028

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian kedua variabel independen (struktur modal dan manajemen laba) dapat digunakan untuk memprediksi pajak penghasilan badan selama periode pengamatan.

3. Uji Autokorelasi

Cara mendekteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah *No Autokorelasi* . Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du, dibantu dengan nilai k (jumlah variabel independen).

Auto korelasi tidak terjadi bila nilai d = 2. Autokorelasi positif terjadi jika d mendekati 0, sedangkan autokorelasi negatif terjadi bila nilai d mendekati 4.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	537=	.288	.277	86343.69840	1.821

- a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba , Struktur Modal
- b. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

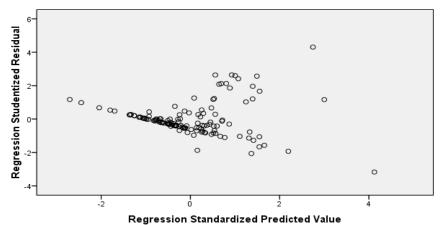
Dari hasil *output* didapatkan nilai statistik uji Durbin-Watson sebesar 1.821 (mendekati 2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabel independen, karena nilai DW berada pada angka - 2 sampai dengan +2.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (*scatterplot*) seperti tampak pada gambar sebagai berikut:

Scatterplot

Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan



Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskesdastisitas

Dari grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan menggunakan regresi berganda untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian hipotesis seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F dan Uji t

ANOVA^b

Mode	el	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	397789271338.308	2	198894635669.154	26.679	.000=
	Residual	984090921477.440	132	7455234253.617		
	Total	1381880192815.748	134			

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba , Struktur Modal

b. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B Std. Error		Beta	t	Siq.	
1	(Constant)	45670.826	10494.120		4.352	.000	
	Struktur Modal	35778.392	9048.797	.295	3.954	.000	
	Manajemen Laba	.049	.009	.402	5.400	.000	

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

- 1. Hasil pengujian statistik dengan melakukan uji secara simultan (Uji F) yaitu struktur modal (DER) dan manajemen laba, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pajak penghasilan badan. Dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut
 - H_o = Tidak terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) dan manajemen laba, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pajak penghasilan badan.
 - H_a = Terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) dan manajemen laba, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pajak penghasilan badan.

Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Dari table *Anova di atas* diperoleh F_{hitung} sebesar 26,679 dimana F_{tabel} sebesar 3,06 (df1= k-1 = 3 - 1 = 2 sedangkan df2 = n - k = 135 - 3 = 132 pengujian dilakukan pada α = 5%, maka nilai F_{tabel} = 3,06). Artinya, $F_{hitung} > F_{tabel}$ (26,679 > 3,06). Jadi kesimpulannya yaitu H_o ditolak dan H_a diterima, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) dan manajemen laba secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- 2. Hasil pengujian statistik dengan melakukan uji secara parsial (Uji t) yaitu struktur modal (DER) secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan. Dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut
 - H_o = Tidak terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan.
 - H_a = Terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan.

Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Dari tabel *Coefficients* diperoleh t_{hitung} sebesar 3,954 dimana t_{tabel} sebesar 1,6563 (N – 1 atau 135 – 1 = 134 didapat t_{tabel} = 1,6563). Artinya, $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,954 > 1,6563). Jadi kesimpulannya yaitu H_o diterima dan H_a ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara struktur modal secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- 3. Hasil pengujian statistik dengan melakukan uji secara parsial (Uji t) yaitu manajemen laba secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan. Dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut
 - H_o = Tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan.
 - H_a = Terdapat pengaruh antara manajemen laba secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan.

Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Dari tabel *Coefficients* diperoleh t_{hitung} sebesar 5,400 dimana t_{tabel} sebesar 1,6563 (N – 1 atau 135 – 1 = 134 didapat t_{tabel} = 1,6563). Artinya, $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,400 > 1,6563). Jadi kesimpulannya yaitu H_o diterima dan H_a ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara manajemen laba secara parsial terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.4 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghsilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Siq.	
1	(Constant)	45670.826	10494.120		4.352	.000	
	Struktur Modal	35778.392	9048.797	.295	3.954	.000	
	Manajemen Laba	.049	.009	.402	5.400	.000	

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

 $Y = 45.670,826 + 35.778,392X_1 + 0,049 X_2$

Keterangan:

Y = Pajak Penghasilan Badan

a = Konstanta

 $X_1 = Struktur Modal$

 X_2 = Manajemen Laba

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 45.670,826. Hal ini menyatakan bahwa variabel struktur modal dan manajemen laba dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka pajak penghasilan badan berada di angka 45.670,826 satuan.

Nilai koefisien regresi $b_1 = 35.778,392$ artinya setiap peningkatan 1 satuan dari struktur modal maka akan mempengaruhi kenaikan pajak penghasilan badan pada pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 35.778,392 satuan dengan syarat variabel bebas lainya konstan. Nilai koefisien regresi $b_2 = 0,049$ artinya setiap peningkatan 1 satuan dari manajemen laba maka akan mempengaruhi kenaikan pajak penghasilan badan pada pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,049 satuan dengan syarat variabel bebas lainya konstan.

4.5 Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan uji korelasi dengan program SPSS diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi (R)

Model Summary

Mode I	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537=	.288	.277	86343.69840

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba , Struktur Modal

Sumber: Hasil Olah Data, (2020)

Sesuai dengan hipotesis statistik, maka hubungan antara struktur modal dan manajemen laba pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan teknik *korelasi product moment* diperoleh koefisien korelasi $r_{y.12} = 0,537$. Hubungan keduanya signifikan, berarti terdapat hubungan positif dengan kekuatan hubungan sedang. Interpretasi tingkat kekuatan korelasi diambil berdasarkan pendapat Sugiyono (2013) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Kekuatan Hubungan					
0,000 - 0,199	Sangat lemah					
0,200 - 0,399	Lemah					
0,400 - 0,599	Sedang					
0,600 - 0,799	Kuat					
0,800 - 1,000	Sangat Kuat					

Sumber: Sugiyono, 2013.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, melalui pengujian serentak dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (adjusted R^2). Dari koefisien determinasi (adjusted R^2) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh nilai (adjusted R^2) = 0,277 yaitu persentase pengaruh struktur modal dan manajemen laba mempengaruhi pajak penghasilan badan sebesar 27,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 72,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal dan manajemen laba secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia dan adapun pengaruh sebagai berikut :

 Pengaruh struktur modal (DER) dan manajemen laba, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal (DER) dan manajemen laba, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia yang ditunjukan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (26,679 > 3,06). Jadi kesimpulannya yaitu H_o ditolak dan H_a diterima, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara struktur modal (DER) dan manajemen laba secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hubungan antara struktur modal dan manajemen laba pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan teknik *korelasi product moment* diperoleh koefisien korelasi $r_{y,12} = 0,537$ (berdasar pada tabel 4.10). Hubungan keduanya signifikan, berarti terdapat hubungan positif dengan kekuatan hubungan sedang.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, melalui pengujian serentak dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (adjusted R^2). Dari koefisien determinasi (adjusted R^2) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Besarnya nilai pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh nilai $(adjusted R^2) = 0,277$ yaitu persentase pengaruh struktur modal dan manajemen laba mempengaruhi

pajak penghasilan badan sebesar 27,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 72,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) yaitu hasil pengujian secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa *long term debt to asset ratio, debt to equity ratio* dan manajemen laba secara bersamasama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada taraf signifikansi 0,001 dengan alpha 5% atau 0,001 < 0,05. Widyaningsih (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan struktur modal dan manajemen berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Annisa (2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa manajemen laba dan struktur modal berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2. Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate. yang ditunjukan dengan nilai $t_{\rm hitung} > t_{\rm tabel}$ (3,954 > 1,6563) dan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 35.778,392 yang artinya setiap peningkatan 1 satuan dari struktur modal maka akan mempengaruhi kenaikan pajak penghasilan badan pada pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 35.778,392 satuan dengan syarat variabel bebas lainya konstan.

Teori menurut Feld et al. dalam Almandero dan Fransisco (2016) menjelaskan bahwa pilihan struktur modal sangat terkait dengan pajak. Teori trade off mengenai struktur modal secara teoritis menjelaskan hubungan antara kebijakan hutang dan pajak. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menentukan rasio hutang optimal dengan membandingkan nilai sekarang dari penghematan pajak tambahan dan biaya tambahan yang mungkin terjadi karena kenaikan hutang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, Susyanti dan Wahono (2018) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat ditarik kesimpulan struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) badan. Simamora dan Ryadi (2015) nilai variabel struktur modal yang di proksikan oleh DER yaitu thitung > tabel atau 2,350 > 2,229 maka H0 ditolak yang berarti DER secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Azhari (2015) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *debt to equity ratio* dan variabel manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terliabilitas perusahaan.

3. Pengaruh manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate. yang ditunjukan dengan nilai $t_{\rm hitung} > t_{\rm tabel}$ (5,400 > 1,6563) dan diperoleh nilai

koefisien regresi sebesar 0,049 artinya setiap peningkatan 1 satuan dari manajemen laba maka akan mempengaruhi kenaikan pajak penghasilan badan pada pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,049 satuan dengan syarat variabel bebas lainya konstan.

Mengingat adanya perbedaan kebutuhan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan high performance untuk kebutuhan pemegang saham, kreditor dan investor, maka ketika akan melakukan earning management, manajemen sering menghadapi suatu konflik kepentingan. Di satu sisi, manajemen umumnya berkeinginan untuk meningkatkan earning yang dilaporkan kepada pemegang saham dan kepada pihak eksternal lainnya (Burgstahler & Dichev, 1997). Namun di sisi lain, manajemen biasanya juga berkeinginan untuk meminimalisir taxable income yang dilaporkan ke kantor pajak (Northcut & Vines, 1998; Schnee, 2006 dalam Ettredge, et al., 2008). Badertscher, et al. (2009) melihat strategi earning management untuk kepentingan pajak biasanya mempertimbangkan antara manfaat pajak yang dihemat dengan risiko terdeteksinya earning management yang dilakukan. Frank, et al. (2009) menemukan hubungan positif antara tax reporting aggressiveness dan aggressive financial reporting.

Penelitian Azhari (2015) menyatakan manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Widyaningsih 2019 hasil penelitiannya menyatakan manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Waharini dan Annisa (2017) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifi kan terhadap manajemen pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan property dan real estate periode 2014-2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Secara simultan (Uji F) semua variabel independen yaitu struktur modal (DER) dan manajemen laba secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Struktur modal (DER) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ((3,954 > 1,6563).
- 3. Manajemen laba secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,400 > 1,6563).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai skripsi yang pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan (studi empiris pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Meskipun ada keuntungan pajak yang ditimbulkan dari penggunaan hutang dalam hal penentuan kebijakan struktur permodalan oleh perusahaan, namun rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka penggunaan hutang justru dapat meningkatkan keuntungan. Nilai rasio yang menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. Dari sudut pandang pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi pula, yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen. Oleh karena itu, sudah seharusnya penggunaan hutang dalam komposisi struktur modal dapat disikapi dengan bijak agar tidak hanya mementingkan kepada tujuan dan kepentingan jangka pendek saja seperti untuk motif pajak misalnya. Tetapi, penggunaan hutang juga harus didasarkan kepada konsep kelangsungan usaha dalam jangka panjang, agar dapat meminimalisir resiko kebangkrutan dan tetap menjaga nilai positif di mata investor dalam hal pembagian dividen saham. Seperti halnya dengan kebijakan hutang dalam struktur modal yang harus disikapi secara cermat, penggunaan teknik pengelolaan laba juga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tepat dan tentunya dilakukan dengan wajar tanpa harus melanggar peraturan standar akuntansi keuangan, peraturan perpajakan yang berlaku dan tentunya tetap menjalankan prinsip etika bisnis yang bermoral.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Terkait Regulasi di Pasar Modal Agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan sektor privat dalam hal penggunaan struktur modal dan hutang oleh perusahaan dalam menyikapi masalah perpajakan,

3. Bagi Penelitian Berikutnya.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk penelitian berikutnya semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat memperbaiki dalam hal jumlah variabel dan kriteria sampel, pemilihan rasio keuangan, model pendeteksian lain yang lebih akurat dalam memprediksi manajamen laba sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang tepat dalam mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang. Variabel lain tersebut antara lain yaitu gross profit margin, net profit margin, biaya operasional, Return On Investment (ROI), Return On Assets, Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio, Debt to Equity Ratio, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Total Aktiva.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Harjito dan Martono. 2016. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta.
- Agus Sartono, 2014. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta.
- Andy Azhari. 2015. Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terliabilitas (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014).
- Ang, Robert. 2017. Buku Pintar Pasar Modal Indonesia, Mediasofi Indonesia, Jakarta.
- Anggraeni, Riske Meitha dan Hadiprajitno, P. Basuki. 2013. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Gorvemance Terhadap Manajemen Laba." Diponegoro Journal of Acounting Vol.2, No.3, Hal. 1-13.
- Angruningrum, Silvia dan Made Gede Wirakusuma. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi Kap Dan Komite Audit pada Audit Delay. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013): 257-270.ISSN: 2302-8556.
- Arifin, S., & Asyik, N. F. 2015. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Growth Potential, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 2, Vol. 4 No. 2, 2-17.
- Bahri, Saiful. 2014. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Andi.
- Bambang Riyanto, 2014. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi. Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta,
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston. 2016. Fundamentals of Financial Management, 14th Edition. Mason: South-Western Cengange Learning.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Chairul Anam, Lustyna Reinsa Zuardi. 2018. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2011-2016). Margin Eco VOL. 2 No.l Mei 2018. Hal. 43-68.
- Christina dan Ekawati. 2014. Excess Cash Holdings Dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.8 No.1. Yogyakarta.

- Eliza Tri Widyaningsih. 2019. Pengaruh Manajemen Laba, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pph Badan Terutang Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam BEI Sektor Real Estate dan Property Tahun 2015 2016. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm 72-88.
- Fadel Ahmad. 2017. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Fifi Suryani Salim dan Apriani Simatupang. 2016. Kinerja Keuangan dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Pengembalian Saham Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2014. Jurnal Administrasi Kantor, Vol. 4, No.l, Juni 2016, 47 67.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Greene, B. 2012. Manajemen Keuangan Edisi Kelima, Erlangga: Jakarta.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Husnan, S. 2004. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*. Jilid 1 dan 2. Edisi Empat, Yogyakarta: BPFE.
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Glueck, 2018. "Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan", Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Keown, Arthur J, David F. Scott, Jr John D. Martin, J. William Petty. 2015. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan Jilid 1*. Edisi Kesepuluh.PT. Indeks. Jakarta.
- Made Astrela Widani. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi. 2015. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPH Badan Terliabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 1 No. 2 Tahun 2015, Hal. 21-31. E-ISSN 2502-4159.
- Purwantini, A. H., Waharini, F. M., & Anisa, F. 2017. *Analisis Determinasi Intensi Whistleblowing Internal*. University Research Colloquium, 55-62.

- Putri Hayyatus Sholihah, Hj. Jeni Susyanti dan Budi Wahono. 2018. Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan "Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015 2017. Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
- Rahmawati. 2012. Teori Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rodoni, A. & Ali, H. 2014. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Roni Dwi Laksono (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terliabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 2017. Tirtayasa EKONOMIKA. Vol. 14, No. 1, April 2019.
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning. (2013). Corporate Tax Management. Observation and Research of Taxation (Ortax). Jakarta.
- Saputra, Moses Dicky Refa & Asyik, Nur Fadjrih. 2017. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,vol 6, no 8, 2017.
- Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory 6th edition. Toronto: Pearson Education Canada.
- Sherly. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017).STIE Multi Data Palembang Program Studi Akuntansi Palembang.
- Sriwardany, 2016. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijaksanaan Struktur Modal dan Dampaknya Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Tbk. MEPA Ekonomi, Vol. 2 No.1.
- Suci Rahmadani. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat). Faculty of economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia. Vol. 2 Nomor 2.
- Sulistiawan, D., Y. Januarsi, dan L. Alvia. 2016. *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Sulistyanto, Sri. 2018. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. IX, No. 18.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari

Alamat : Kp. Babakan Rt.002 Rw. 002 Desa Sukajadi

Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor 16610

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Oktober 1997

Umur : 24 Tahun Agama : Islam

Pendidikan

SD : SDN Gadog 02 Bogor
 SMP : SMPN 1 Tamansari Bogor
 SMA : SMK YKTB 2 Bogor
 Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2021

Peneliti,

(Ayu Lestari)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Struktur Modal, Manajemen Laba dan Pajak Penghasilan Badan

No	Tahun	Emiten	Struktur Modal	Manajemen Laba	Pajak Penghasilan Badan
1	2014	Alam Sutera Realty Tbk.	1,66	1.176.955	208.812
2	2014	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,74	1.205	127
3	2014	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,36	19.659	5.392
4	2014	Bukit Darmo Property Tbk.	0,39	7.195	7.636
5	2014	Sentul City Tbk.	0,58	40.727	27.780
6	2014	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,52	3.996.464	309.862
7	2014	Cowell Development Tbk.	1,73	165.397	41.443
8	2014	Ciputra Development Tbk.	1,04	1.794.143	353.226
9	2014	Duta Anggada Realty Tbk.	0,58	408.109	87.009
10	2014	Intiland Development Tbk.	1,01	432.417	96
11	2014	Duta Pertiwi Tbk.	0,28	701.641	99.475
12	2014	Bakrieland Development Tbk.	0,91	474.715	76.408
13	2014	Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,61	2.424	1.962
14	2014	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	1,29	120.000	15.978
15	2014	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,71	91.601	36.622
16	2014	Jaya Real Property Tbk.	1,09	714.531	108.066
17	2014	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,82	394.055	165.801
18	2014	Lippo Cikarang Tbk.	0,61	844.123	98.171
19	2014	Lippo Karawaci Tbk.	1,14	3.135.216	559.763
20	2014	Modernland Realty Tbk.	0,96	711.212	135.947
21	2014	Metropolitan Kentjana Tbk.	1,00	437.465	113.697
22	2014	Indonesia Prima Property Tbk	0,26	107.057	16.511
23	2014	Pakuwon Jati Tbk.	1,02	2.598.832	10.401
24	2014	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,18	3.001	2.463
25	2014	Roda Vivatex Tbk.	0,22	232.637	39.750
26	2014	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,43	4.404	17.379
27	2014	Summarecon Agung Tbk.	1,57	1.387.517	296.582
28	2015	Alam Sutera Realty Tbk.	1,83	684.288	74.670
29	2015	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,67	1.659	143
30	2015	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,16	11.040	4.162
31	2015	Bukit Darmo Property Tbk.	0,38	(28.227)	-
32	2015	Sentul City Tbk.	0,70	61.674	373
33	2015	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,63	2.351.380	10.702
34	2015	Cowell Development Tbk.	2,02	(178.692)	41.094
35	2015	Ciputra Development Tbk.	1,01	1.885.084	279.597

No	Tahun	Emiten	Struktur Modal	Manajemen Laba	Pajak Penghasilan Badan
36	2015	Duta Anggada Realty Tbk.	0,67	177.766	62.411
37	2015	Intiland Development Tbk.	1,16	419.044	157
38	2015	Duta Pertiwi Tbk.	0,23	670.949	930
39	2015	Bakrieland Development Tbk.	1,20	(724.167)	17.945
40	2015	Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,31	159.505	11.945
41	2015	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	1,30	118.495	934
42	2015	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,66	72.893	938
43	2015	Jaya Real Property Tbk.	0,83	869.777	9.841
44	2015	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,69	331.443	13.614
45	2015	Lippo Cikarang Tbk.	0,51	914.989	15.528
46	2015	Lippo Karawaci Tbk.	1,18	1.024.121	260.709
47	2015	Modernland Realty Tbk.	1,12	873.420	86.689
48	2015	Metropolitan Kentjana Tbk.	1,02	889.629	631
49	2015	Indonesia Prima Property Tbk	0,26	(23.146)	1.010
50	2015	Pakuwon Jati Tbk.	0,99	1.400.554	24.588
51	2015	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,08	(3.086)	-
52	2015	Roda Vivatex Tbk.	0,18	256.263	(228)
53	2015	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,29	7.524	159
54	2015	Summarecon Agung Tbk.	1,49	1.064.080	318.103
55	2016	Alam Sutera Realty Tbk.	1,81	510.243	81.110
56	2016	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,49	13.212	31
57	2016	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,37	27.224	6.183
58	2016	Bukit Darmo Property Tbk.	0,44	(28.948)	-
59	2016	Sentul City Tbk.	0,59	562.427	(36)
60	2016	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,57	2.037.538	27.905
61	2016	Cowell Development Tbk.	1,91	(23.451)	35.953
62	2016	Ciputra Development Tbk.	1,03	1.170.706	330.143
63	2016	Duta Anggada Realty Tbk.	0,67	191.876	41.799
64	2016	Intiland Development Tbk.	1,34	297.351	1.936
65	2016	Duta Pertiwi Tbk.	0,24	840.651	3.724
66	2016	Bakrieland Development Tbk.	1,20	(547.265)	17.812
67	2016	Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,15	276.909	2.044
68	2016	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0,92	86.915	592
69	2016	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,55	46.996	335
70	2016	Jaya Real Property Tbk.	0,73	1.017.849	9.631
71	2016	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,90	426.542	85.957
72	2016	Lippo Cikarang Tbk.	0,33	539.795	10.076
73	2016	Lippo Karawaci Tbk.	1,07	1.227.374	330.373

No	Tahun	Emiten	Struktur Modal	Manajemen Laba	Pajak Penghasilan Badan
74	2016	Modernland Realty Tbk.	1,20	501.350	49.220
75	2016	Metropolitan Kentjana Tbk.	0,78	1.199.374	426
76	2016	Indonesia Prima Property Tbk	0,64	318.395	(2.091)
77	2016	Pakuwon Jati Tbk.	0,88	1.780.255	(48.491)
78	2016	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,03	(6.713)	-
79	2016	Roda Vivatex Tbk.	0,15	260.009	(30)
80	2016	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,25	2.043	(136)
81	2016	Summarecon Agung Tbk.	1,55	605.051	272.454
82	2017	Alam Sutera Realty Tbk.	1,42	1.385.189	59.475
83	2017	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,35	4.951	-
84	2017	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,44	(31.034)	6.264
85	2017	Bukit Darmo Property Tbk.	0,57	(4.317)	5.075
86	2017	Sentul City Tbk.	0,51	468.559	(249)
87	2017	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,57	5.188.772	39.349
88	2017	Cowell Development Tbk.	2,17	(69.033)	35.099
89	2017	Ciputra Development Tbk.	1,05	1.018.529	279.484
90	2017	Duta Anggada Realty Tbk.	0,79	30.178	25.083
91	2017	Intiland Development Tbk.	1,08	271.537	(98.864)
92	2017	Duta Pertiwi Tbk.	0,27	648.646	4.366
93	2017	Bakrieland Development Tbk.	1,28	(269.806)	9.439
94	2017	Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,18	8.731	1.202
95	2017	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0,77	68.230	10
96	2017	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,45	37.316	644
97	2017	Jaya Real Property Tbk.	0,60	1.117.126	45.226
98	2017	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,91	149.841	(19.761)
99	2017	Lippo Cikarang Tbk.	0,60	36.844	12.308
100	2017	Lippo Karawaci Tbk.	0,90	856.984	310.145
101	2017	Modernland Realty Tbk.	1,06	614.774	62.018
102	2017	Metropolitan Kentjana Tbk.	0,50	1.193.640	90
103	2017	Indonesia Prima Property Tbk	0,06	(66.194)	(1.741)
104	2017	Pakuwon Jati Tbk.	0,83	2.024.627	47.065
105	2017	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,24	1.452	-
106	2017	Roda Vivatex Tbk.	0,11	246.901	199
107	2017	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,26	19.737	674
108	2017	Summarecon Agung Tbk.	1,59	532.438	266.510
109	2018	Alam Sutera Realty Tbk.	1,28	638.713	49.477
110	2018	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,02	3.193	-
111	2018	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,47	(33.706)	(1.044)

No	Tahun	Emiten	Struktur Modal	Manajemen Laba	Pajak Penghasilan Badan
112	2018	Bukit Darmo Property Tbk.	0,62	(26.711)	2.517
113	2018	Sentul City Tbk.	0,54	43.283	469
114	2018	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,57	876.937	5.918
115	2018	Cowell Development Tbk.	2,87	(20.525)	24.260
116	2018	Ciputra Development Tbk.	1,10	657.163	182.034
117	2018	Duta Anggada Realty Tbk.	0,83	15.868	(18.884)
118	2018	Intiland Development Tbk.	1,16	11.601	83.329
119	2018	Duta Pertiwi Tbk.	0,31	811.388	2.128
120	2018	Bakrieland Development Tbk.	0,24	(51.766)	226
121	2018	Fortune Mate Indonesia Tbk.	1,05	(9.623)	1.378
122	2018	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0,67	46.307	454
123	2018	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,45	28.754	146
124	2018	Jaya Real Property Tbk.	0,64	699.762	19.578
125	2018	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	1,07	(386.446)	(7.592)
126	2018	Lippo Cikarang Tbk.	0,25	2.905.658	12
127	2018	Lippo Karawaci Tbk.	0,95	1.755.266	231.885
128	2018	Modernland Realty Tbk.	1,25	73.323	(25.838)
129	2018	Metropolitan Kentjana Tbk.	0,35	788.145	42
130	2018	Indonesia Prima Property Tbk	0,10	(54.677)	1.033
131	2018	Pakuwon Jati Tbk.	0,70	2.000.139	21.655
132	2018	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,47	2.881	975
133	2018	Roda Vivatex Tbk.	0,12	198.423	26
134	2018	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,26	43.397	(1.101)
135	2018	Summarecon Agung Tbk.	1,63	392.247	187.171

Lampiran 2.

Nilai Struktur Modal Perusahaan Property dan Real Estate
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018
(dalam jutaan rupiah)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018
1	Alam Sutera Realty Tbk.	1,66	1,83	1,81	1,42	1,28
2	Bekasi Asri Pemula Tbk.	0,74	0,67	0,49	0,35	0,02
3	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	0,36	0,16	0,37	0,44	0,47
4	Bukit Darmo Property Tbk.	0,39	0,38	0,44	0,57	0,62
5	Sentul City Tbk.	0,58	0,70	0,59	0,51	0,54
6	Bumi Serpong Damai Tbk.	0,52	0,63	0,57	0,57	0,57
7	Cowell Development Tbk.	1,73	2,02	1,91	2,17	2,87
8	Ciputra Development Tbk.	1,04	1,01	1,03	1,05	1,10
11	Duta Anggada Realty Tbk.	0,58	0,67	0,67	0,79	0,83
12	Intiland Development Tbk.	1,01	1,16	1,34	1,08	1,16
13	Duta Pertiwi Tbk.	0,28	0,23	0,24	0,27	0,31
14	Bakrieland Development Tbk.	0,91	1,20	1,20	1,28	0,24
15	Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,61	0,31	0,15	0,18	1,05
16	Gowa Makassar Tourism	1,29	1,30	0,92	0,77	0,67
	Development Tbk.				ŕ	ŕ
17	Perdana Gapuraprima Tbk.	0,71	0,66	0,55	0,45	0,45
18	Jaya Real Property Tbk.	1,09	0,83	0,73	0,60	0,64
19	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,82	0,69	0,90	0,91	1,07
22	Lippo Cikarang Tbk.	0,61	0,51	0,33	0,60	0,25
23	Lippo Karawaci Tbk.	1,14	1,18	1,07	0,9	0,95
24	Modernland Realty Tbk.	0,96	1,12	1,2	1,06	1,25
25	Metropolitan Kentjana Tbk.	1	1,02	0,78	0,5	0,35
26	Indonesia Prima Property Tbk	0,26	0,26	0,64	0,06	0,1
27	Pakuwon Jati Tbk.	1,02	0,99	0,88	0,83	0,7
28	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0,18	0,08	0,03	0,24	0,47
29	Roda Vivatex Tbk.	0,22	0,18	0,15	0,11	0,12
31	Suryamas Dutamakmur Tbk.	0,43	0,29	0,25	0,26	0,26
32	Summarecon Agung Tbk.	1,57	1,49	1,55	1,59	1,63
	Rata-Rata	0,80	0,80	0,77	0,72	0,74

Sumber: IDX. Data diolah (2020)

Nilai Manajemen Laba Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

(dalam jutaan rupiah)

1 Alam Sutera Realty Tbk. 1.176.955 684.288 510.243 1.385.189 638.713 2 Bekasi Asri Pemula Tbk. 1.205 1.659 13.212 4.951 3.193 3 Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 19.659 11.040 27.224 (31.034) (33.706) 4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.195 (28.227) (28.948) (4.317) (26.711) 5 Sentul City Tbk. 40.727 61.674 562.427 468.559 43.283 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modemland Realty Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.00	No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018
2 Bekasi Asri Pemula Tbk. 1.205 1.659 13.212 4.951 3.193 3 Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 19.659 11.040 27.224 (31.034) (33.706) 4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.195 (28.227) (28.948) (4.317) (26.711) 5 Sentul City Tbk. 40.727 61.674 562.427 468.559 43.283 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 </td <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			-				
3 Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 19.659 11.040 27.224 (31.034) (33.706) 4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.195 (28.227) (28.948) (4.317) (26.711) 5 Sentul City Tbk. 40.727 61.674 562.427 468.559 43.283 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.195 (28.227) (28.948) (4.317) (26.711) 5 Sentul City Tbk. 40.727 61.674 562.427 468.559 43.283 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 10.18.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9							
5 Sentul City Tbk. 40.727 61.674 562.427 468.559 43.283 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 71.600 118.495 86.915 68.230						` ′	`
6 Bumi Serpong Damai Tbk. 3.996.464 2.351.380 2.037.538 5.188.772 876.937 7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td>` ′</td> <td>` ′</td>				, ,		` ′	` ′
7 Cowell Development Tbk. 165.397 (178.692) (23.451) (69.033) (20.525) 8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126		· ·					
8 Ciputra Development Tbk. 1.794.143 1.885.084 1.170.706 1.018.529 657.163 11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 <td></td> <td>1 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		1 0					
11 Duta Anggada Realty Tbk. 408.109 177.766 191.876 30.178 15.868 12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844				_ `		` ′	
12 Intiland Development Tbk. 432.417 419.044 297.351 271.537 11.601 13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984		1					
13 Duta Pertiwi Tbk. 701.641 670.949 840.651 648.646 811.388 14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774		<u> </u>					
14 Bakrieland Development Tbk. 474.715 (724.167) (547.265) (269.806) (51.766) 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.		1					
15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 2.424 159.505 276.909 8.731 (9.623) 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194)<							
16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 120.000 118.495 86.915 68.230 46.307 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.6		-		, ,		` ′	, ,
16 17Development Tbk.120.000118.49586.91568.23046.30717Perdana Gapuraprima Tbk.91.60172.89346.99637.31628.75418Jaya Real Property Tbk.714.531869.7771.017.8491.117.126699.76219Kawasan Industri Jababeka Tbk.394.055331.443426.542149.841(386.446)22Lippo Cikarang Tbk.844.123914.989539.79536.8442.905.65823Lippo Karawaci Tbk.3.135.2161.024.1211.227.374856.9841.755.26624Modernland Realty Tbk.711.212873.420501.350614.77473.32325Metropolitan Kentjana Tbk.437.465889.6291.199.3741.193.640788.14526Indonesia Prima Property Tbk107.057(23.146)318.395(66.194)(54.677)27Pakuwon Jati Tbk.2.598.8321.400.5541.780.2552.024.6272.000.13928Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.3.001(3.086)(6.713)1.4522.88129Roda Vivatex Tbk.232.637256.263260.009246.901198.42331Suryamas Dutamakmur Tbk.4.4047.5242.04319.73743.39732Summarecon Agung Tbk.1.387.5171.064.080605.051532.438392.247	15		2.424	159.505	276.909	8.731	(9.623)
Development Tbk. 91.601 72.893 46.996 37.316 28.754 18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881	16		120,000	118 495	86 915	68 230	46 307
18 Jaya Real Property Tbk. 714.531 869.777 1.017.849 1.117.126 699.762 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901		1					
19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 394.055 331.443 426.542 149.841 (386.446) 22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.0		1 1	91.601	72.893			28.754
22 Lippo Cikarang Tbk. 844.123 914.989 539.795 36.844 2.905.658 23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.24		1 0					699.762
23 Lippo Karawaci Tbk. 3.135.216 1.024.121 1.227.374 856.984 1.755.266 24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	19	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	394.055	331.443	426.542	149.841	(386.446)
24 Modernland Realty Tbk. 711.212 873.420 501.350 614.774 73.323 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	22	Lippo Cikarang Tbk.	844.123	914.989	539.795	36.844	2.905.658
25 Metropolitan Kentjana Tbk. 437.465 889.629 1.199.374 1.193.640 788.145 26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	23	Lippo Karawaci Tbk.	3.135.216	1.024.121	1.227.374	856.984	1.755.266
26 Indonesia Prima Property Tbk 107.057 (23.146) 318.395 (66.194) (54.677) 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	24	Modernland Realty Tbk.	711.212	873.420	501.350	614.774	73.323
27 Pakuwon Jati Tbk. 2.598.832 1.400.554 1.780.255 2.024.627 2.000.139 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	25	Metropolitan Kentjana Tbk.	437.465	889.629	1.199.374	1.193.640	788.145
28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.452 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	26	Indonesia Prima Property Tbk	107.057	(23.146)	318.395	(66.194)	(54.677)
Z8 Tbk. 3.001 (3.086) (6.713) 1.432 2.881 29 Roda Vivatex Tbk. 232.637 256.263 260.009 246.901 198.423 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	27		2.598.832	1.400.554	1.780.255	2.024.627	2.000.139
31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 4.404 7.524 2.043 19.737 43.397 32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	28	=	3.001	(3.086)	(6.713)	1.452	2.881
32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	29	Roda Vivatex Tbk.	232.637	256.263	260.009	246.901	198.423
32 Summarecon Agung Tbk. 1.387.517 1.064.080 605.051 532.438 392.247	31	Suryamas Dutamakmur Tbk.	4.404	7.524	2.043	19.737	43.397
	32		1.387.517	1.064.080	605.051	532.438	392.247

Sumber: IDX. Data diolah (2020)

Pajak Penghasilan Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

(dalam jutaan rupiah)

Alam Sutera Realty Tbk. 208.812 74.670 81.110 59.475 49.477	No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018
Bekasi Asri Pemula Tbk.							
3 Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 5.392 4.162 6.183 6.264 (1.044) 4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.636 - 5.075 2.517 5 Sentul City Tbk. 27.780 373 (36) (249) 469 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 309.862 10.702 27.905 39.349 5.918 7 Cowell Development Tbk. 41.443 41.094 35.953 35.099 24.260 8 Ciputra Development Tbk. 353.226 279.597 3 3 4 182.034 11 Duta Anggada Realty Tbk. 87.009 62.411 41.799 25.083 (18.884) 12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (9.864 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 12 Lippo Cikarang Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 24.63 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 19 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Suryamas Dutamakmur Tbk. 246.582 318.103 272.45 266.51 187.171 32 32 Suryamas Dutamakmur Tbk. 246.582 318.103 272.45 266.51 187.171 32.00 20.0						-	-
4 Bukit Darmo Property Tbk. 7.636 - - 5.075 2.517 5 Sentul City Tbk. 27.780 373 (36) (249) 469 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 309.862 10.702 27.905 39.349 5.918 7 Cowell Development Tbk. 41.443 41.094 35.953 35.099 24.260 8 Ciputra Development Tbk. 353.226 279.597 30.14 279.48 182.034 11 Duta Anggada Realty Tbk. 87.009 62.411 41.799 25.083 (18.884) 12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk.						6.264	(1.044)
5 Sentul City Tbk. 27.780 373 (36) (249) 469 6 Bumi Serpong Damai Tbk. 309.862 10.702 27.905 39.349 5.918 7 Cowell Development Tbk. 41.443 41.094 35.953 35.099 24.260 8 Ciputra Development Tbk. 353.226 279.597 30.14 279.48 182.034 11 Duta Anggada Realty Tbk. 87.009 62.411 41.799 25.083 (18.884) 12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Bowa Makassar Tourism 15.978				-	-		` ′
6 Bumi Serpong Damai Tbk. 309.862 10.702 27.905 39.349 5.918 7 Cowell Development Tbk. 41.443 41.094 35.953 35.099 24.260 8 Ciputra Development Tbk. 353.226 279.597 30.14 279.48 182.034 11 Duta Anggada Realty Tbk. 87.009 62.411 41.799 25.083 (18.884) 12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761 (7.592) 22 Lippo Cika		1 0		373	(36)		
7 Cowell Development Tbk. 41.443 41.094 35.953 35.099 24.260 8 Ciputra Development Tbk. 353.226 279.597 330.14 279.48 182.034 11 Duta Anggada Realty Tbk. 87.009 62.411 41.799 25.083 (18.884) 12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (98.864) 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 16.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababek	6	•					
Ciputra Development Tok. 353.226 279.597 3 4 182.034	7	i i	41.443	41.094			24.260
12 Intiland Development Tbk. 96 157 1.936 (98.864 83.329 13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761 7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 12 12 12 12 12 12 1	8	Ciputra Development Tbk.	353.226	279.597			182.034
13 Duta Pertiwi Tbk. 99.475 930 3.724 4.366 2.128 14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 3 5 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491	11	Duta Anggada Realty Tbk.	87.009	62.411	41.799	25.083	(18.884)
14 Bakrieland Development Tbk. 76.408 17.945 17.812 9.439 226 15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 231.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Pro	12	Intiland Development Tbk.	96	157	1.936	(98.864	83.329
15 Fortune Mate Indonesia Tbk. 1.962 11.945 2.044 1.202 1.378 16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 12.308 12 12.308 12 12.308 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614 13.697 13.614	13	Duta Pertiwi Tbk.	99.475	930	3.724	4.366	2.128
16 Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 231.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 2.463 - - - 975 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	14	Bakrieland Development Tbk.	76.408	17.945	17.812	9.439	226
16 Development Tbk. 15.978 934 592 10 454 17 Perdana Gapuraprima Tbk. 36.622 938 335 644 146 18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761 7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 15	15	Fortune Mate Indonesia Tbk.	1.962	11.945	2.044	1.202	1.378
18 Jaya Real Property Tbk. 108.066 9.841 9.631 45.226 19.578 19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 231.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Surpamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 <td>16</td> <td></td> <td>15.978</td> <td>934</td> <td>592</td> <td>10</td> <td>454</td>	16		15.978	934	592	10	454
19 Kawasan Industri Jababeka Tbk. 165.801 13.614 85.957 (19.761) (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 (310.14) (330.14) (330.37)	17	Perdana Gapuraprima Tbk.	36.622	938	335	644	146
19 Rawasan Industri Jababeka 1bk. 165.801 13.614 85.957 (7.592) 22 Lippo Cikarang Tbk. 98.171 15.528 10.076 12.308 12 23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 231.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Suppersoon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	18	Jaya Real Property Tbk.	108.066	9.841	9.631	45.226	19.578
23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 330.37 310.14 5 531.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Suppose Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	19	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	165.801	13.614	85.957	(19.761	(7.592)
23 Lippo Karawaci Tbk. 559.763 260.709 3 5 231.885 24 Modernland Realty Tbk. 135.947 86.689 49.220 62.018 (25.838) 25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	22	Lippo Cikarang Tbk.	98.171	15.528	10.076	12.308	12
25 Metropolitan Kentjana Tbk. 113.697 631 426 90 42 26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	23	Lippo Karawaci Tbk.	559.763	260.709			231.885
26 Indonesia Prima Property Tbk 16.511 1.010 (2.091) (1.741) 1.033 27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	24	Modernland Realty Tbk.	135.947	86.689	49.220	62.018	(25.838)
27 Pakuwon Jati Tbk. 10.401 24.588 (48.491)	25	Metropolitan Kentjana Tbk.	113.697	631	426	90	42
27 Pakuwon Jati 1bk. 10.401 24.588) 47.065 21.655 28 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 2.463 - - - 975 29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	26	Indonesia Prima Property Tbk	16.511	1.010	(2.091)	(1.741)	1.033
29 Roda Vivatex Tbk. 39.750 (228) (30) 199 26 31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296.582 318.103 272.45 266.51 187.171	27	Pakuwon Jati Tbk.	10.401	24.588	(48.491	47.065	21.655
31 Suryamas Dutamakmur Tbk. 17.379 159 (136) 674 (1.101) 32 Summarecon Agung Tbk 296 582 318 103 272.45 266.51 187 171	28	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	2.463	_	-	-	975
32 Summarecon Agung Thk 296 582 318 103 272.45 266.51 187 171	29		39.750	(228)	(30)	199	26
1 37 Nimmarecon Adiind Ink 796 387 318 1113	31	Suryamas Dutamakmur Tbk.	17.379	159	(136)	674	(1.101)
<u> </u>	32	Summarecon Agung Tbk.	296.582	318.103			187.171

Sumber: IDX. Data diolah (2020)

Lampiran 3. Hasil Olah Data Dengan SPSS

Variables Entered/Removed^b

Mo	ode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	1 Manajemen Laba , Struktur Modal			Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537=	.288	277	86343.69840

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba , Struktur Modal

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	397789271338.308	2	198894635669.154	26.679	-000°
	Residual	984090921477.440	132	7455234253.617		
	Total	1381880192815.748	134			

- a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba , Struktur Modal
- b. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Siq.
1	(Constant)	45670.826	10494.120		4.352	.000
	Struktur Modal	35778.392	9048.797	.295	3.954	.000
	Manajemen Laba	.049	.009	.402	5.400	.000

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Residuals Statistics^a

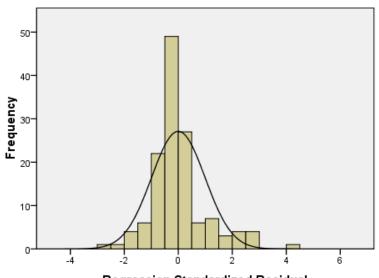
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-9.4140E4	2.7790E5	5.3180E4	54484.64602	135
Residual	-2.3855E5	3.56930E5	.00000	85696.92002	135
Std. Predicted Value	-2.704	4.125	.000	1.000	135
Std. Residual	-2.763	4.134	.000	.993	135

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Histogram

Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

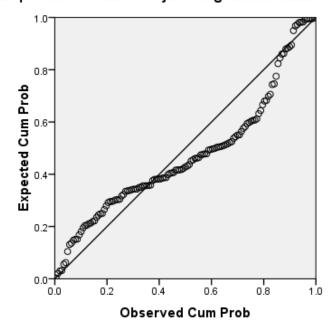
Mean =5.38E-17 Std. Dev. =0.993 N =135



Regression Standardized Residual

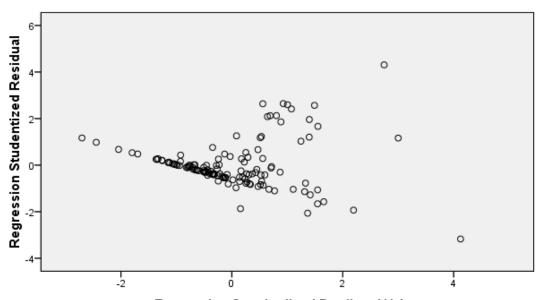
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan



Scatterplot

Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan



Regression Standardized Predicted Value